



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Senin

Tanggal: 22 Maret 2021

Halaman: 2

ANGGARAN PENANGANAN COVID-19 TERSTRUKTUR
Pemkot Pastikan Tak 'Refocusing' APBD 2021

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya memastikan tidak akan melakukan refocusing APBD 2021, seperti halnya yang dilakukan tahun lalu. Alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 sudah terstruktur di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).

Asisten Sekda Bidang Perencanaan dan Pembangunan Kadri Renggono, menjelaskan struktur APBD Kota Yogya 2021 telah mengakomodasi berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 maupun pemulihan ekonomi. "Kemarin kita memutuskan untuk tidak melakukan refocusing anggaran," tandanya, Rabu (17/3).

Sebelumnya, merujuk Surat Edaran (SE) dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor SE-2/TK/2021 terkait penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah, terdapat sejumlah refocusing. Terutama berkaitan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Insentif Daerah (DID) serta Dana Alokasi Khusus (DAK). Refocusing tersebut menyangkut penanganan pandemi Covid-19, termasuk dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro.

Khusus DAU, minimal dialokasikan delapan persen dengan memperhatikan tingkat kasus Covid-19 yang ditetapkan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pemanfaatan untuk mendukung vaksinasi, posko di kelurahan serta insentif tenaga kesehatan daerah. Sedangkan DID, minimal dialokasikan 30 persen dari yang diterima daerah untuk bidang kesehatan.

"Kalau kita petakan persentasenya untuk penanganan Covid-19 memang cukup besar. Tidak hanya penanganan medisnya tetapi juga aspek pencegahan termasuk vaksinasi dan dukungan operasional PPKM mikro," imbuh Kadri.

Kegiatan penanganan Covid-19 pun tidak tercentral pada satu instansi melainkan tersebar di berbagai OPD sesuai kegiatan yang dilampu. Selain itu jika ada kebutuhan yang mendesak dan belum dialokasikan melalui APBD, maka masih ada pos biaya tidak terduga yang besarnya mencapai Rp 13 miliar. Apalagi status pandemi Covid-19 di lingkungan DIY saat ini masih tanggap darurat sehingga pencairan biaya tidak terduga bisa lebih cepat.

Di samping itu *cash flow* anggaran juga masih bisa diampu melalui sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) APBD 2020 lalu. Besaran silpa tahun lalu pun mencapai angka ratusan miliar rupiah.

"Semua kegiatan tetap bisa berjalan sesuai dengan hasil pembahasan anggaran," jelas Kadri yang menyebut tidak ada sanksi bagi daerah yang tidak melakukan refocusing APBD.

(Dhi)-f

*Sekda
BNPB
Netral
biasa
untuk diketahui*

Tindak Lanjut

☐ Untuk Ditanggapi
☐ Untuk Diketahui
☐ Jumpa Pers

Kepala
Ttd

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPKAD			

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005